

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jepang merupakan salah satu negara yang sangat aktif dan simpatik dalam berbagai isu-isu internasional, termasuk dalam isu-isu penanggulangan bencana dan juga isu-isu kemanusiaan. Jepang menjadi negara yang aktif, sigap dan banyak terlibat dalam memberikan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan dengan berbagai bentuk bantuan, seperti bentuk finansial, teknik maupun bantuan non-material lainnya. Keterlibatan Jepang dalam isu-isu kemanusiaan itu tidak datang dalam waktu yang singkat, tetapi melibatkan sebuah perjalanan panjang dari pengalaman pahit Jepang sejak satu abad terakhir. Keterlibatan Jepang dalam memberikan bantuan kemanusiaan dapat di runut dari perubahan statusnya yang semula dulunya penerima bantuan sampai kemudian menjadi pemberi bantuan.

Dimulai setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia kedua, misi Jepang pertama kali saat itu yaitu untuk membangun kembali negaranya yang hancur secara fisik, sosial dan ekonomi. Pada masa itu Jepang mendapatkan bantuan donor dari *Government and Relief in Occupied Areas* (GARIOA) dan *Economic Rehabilitation in Occupied Areas* (EROA), yaitu sebuah program dibawah naungan Amerika Serikat yang dibuat setelah berakhirnya perang dunia kedua dan diperuntukan khusus untuk negara-negara yang amat hancur akibat perang dunia kedua seperti Jepang, Jerman, dan Austria. Pemerintah Jepang menggunakan dana dari GARIOA-EROA untuk memenuhi kebutuhan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya untuk masyarakat Jepang. Dari tahun 1946 sampai 1951 Jepang telah menerima 2 milyar kredit dari EROA (Takashi, 2000).

Ketika Jepang masih menjadi penerima bantuan donor itu sendiri, Jepang dipaksa menjadi pemberi bantuan pengembangan ke beberapa negara dalam bentuk sanksi dari perbaikan perang yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut perjanjian damai San Francisco tahun 1951 (Sutarto, 2006), Jepang diwajibkan untuk membayar ganti rugi atas perlakuannya saat perang dunia kedua

kepada 12 negara di Asia Timur. Sebuah sanksi yang harus terlaksana sebelum kembali bergabung kedalam komunitas internasional. Pada bulan November 1954, Perdana Menteri Yoshida Shigeru menandatangani perjanjian pertama dalam bentuk perbaikan dan kerja sama ekonomi dengan Burma (Takashi, 2000). Kemudian dilanjutkan perjanjian dengan Filipina pada tahun 1956, dan dengan Indonesia pada tahun 1958. Jepang terus menyediakan bantuan luar negeri pada umumnya dalam bentuk perbaikan ganti rugi (*reparations*) dan bentuk pinjaman dana. Jepang melanjutkan aksinya, hingga pada tahun 1970 menjadi negara pemberi bantuan luar negeri kelima terbesar dalam nilai dollar AS untuk *Official Development Assistance* (ODA) (Takagi, 1995).

Pasca Perang Dunia kedua Jepang menyadari bahwa keamanan suatu negara tidak hanya terbebas dari ancaman keamanan tradisional. Isu-isu tradisional sebagian besar melibatkan kekerasan atau perusakan yang menjadi ancaman bagi suatu negara, tetapi juga dapat muncul dari ancaman keamanan non-tradisional. Ketika isu keamanan tidak lagi membicarakan isu-isu tentang keamanan suatu negara, isu *human security* menjadi salah satu isu baru bagi Jepang terkait ancaman keamanan suatu negara (Nasukawa, 2008). Seperti perang, pengungsian, kekeringan dan juga bencana alam. Hal itu disadari oleh Jepang ketika adanya ancaman keamanan non-tradisional yang berasal dari lingkungan sekitar, seperti bencana alam yang dapat menimpa suatu negara (Gautam, 2005).

Kesadaran itu dimulai pada tahun 1946 ketika Jepang ditimpa musibah bencana gempa di Nankaido. Pada tanggal 20 Desember 1946, ketika Jepang masih berusaha memulihkan negaranya dari kehancuran yang terjadi akibat perang dunia kedua, musibah datang dari bencana alam. Di kenal dengan sebutan gempa Nankaido, merupakan gempa bumi yang sangat besar dengan kekuatan hingga 8.1 Skala Richter (SR). Bantuan dari berbagai negara pun datang untuk Jepang. Seperti bantuan pakaian, makanan dan sebagainya (Science, 2011).

Wilayah Jepang berada di dalam zona Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*), lokasi ini menjadi tempat banyaknya gempa bumi di dunia dan letusan gunung berapi terjadi, yang dapat memicu

tsunami. Tercatat dalam kurang satu abad terakhir, Jepang telah mengalami beberapa peristiwa gempa bumi besar yang dapat memicu tsunami, yaitu gempa bumi dengan kekuatan antara 8-9 SR. Gempa Nankaido terjadi pada tahun 1946 sebanyak 1.362 orang meninggal akibat bencana tersebut. Tahun 1968 telah terjadi bencana alam yang dinamakan Gempa Aomori dengan kekuatan 8.2 SR dan diikuti oleh tsunami sehingga menewaskan 52 orang. Pada tahun 2006 telah terjadi gempa bumi di wilayah pulau Kuril yang berkekuatan 8.4 SR dan disertai tsunami yang menyapu seisi pulau. Tetapi tidak ada satu pun korban jiwa akibat tsunami tersebut. Pada tahun 2011 Jepang kembali dilanda bencana alam yang cukup dasyat, wilayah Tohoku di guncang gempa dengan kekuatan 9 SR dan disertai tsunami yang menyebabkan sekitar 29.000 orang meninggal. (Science, 2011).

Akibat banyaknya bencana yang dialami oleh Jepang, membuat negara ini memiliki pengalaman yang sangat luas serta memiliki kemampuan teknologi yang didukung oleh kemampuan bertahan masyarakat yang sangat tinggi. Selain itu negara Jepang terkenal sebagai negara yang sangat sigap menghadapi bencana karena memiliki sistem penanggulangan bencana (*Disaster Management*) terbaik di dunia. Seluruh pengalaman yang dimiliki Jepang membuat negara ini menyadari akan pentingnya pertolongan yang dibutuhkan suatu negara disaat negara tersebut terkena bencana alam. Kesadaran itu menjadi kan Jepang aktif dalam memberikan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan pertolongan dari negara lain, Seperti bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Thailand, Sri lanka, Maldiv dan termasuk bencana tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia.

Secara geologis, wilayah Indonesia tergolong sebagai suatu negara yang memiliki kerentanan terkena bencana alam termasuk gempa bumi dan tsunami. Jepang dan Indonesia telah menjalin hubungan bilateral yang cukup lama dan dalam berbagai bentuk kerjasama, khususnya dalam bidang pengendalian bencana. Dimulai sejak tahun 1962 dimana pasca perjanjian perdamaian antara Jepang dan Indonesia, pemerintah Jepang telah mengirim tenaga ahlinya dibidang perairan dalam kerangka OCTA (*Overseas Technical Cooperation Agency*),

sebelum menjadi JICA (*Japan Internasional Cooperation Agency*). Hal ini merupakan bukti dari bentuk hubungan diplomatik antara kedua negara dan Jepang telah menjadi negara yang memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia hingga sekarang.

Keterlibatan Jepang dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia yang paling banyak dan yang paling mendapat sorotan yaitu ketika terjadinya bencana gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam. Bencana gempa dan tsunami yang maha dahsyat terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember 2004 telah membuat Pemerintah Indonesia dan dunia bersatu untuk menanggulangi serta memperbaiki keadaan dalam waktu secepatnya. Bencana ini merupakan gempa bumi terbesar ketiga yang pernah tercatat di alat sensor getaran atau gempa (*seismograf*) dan durasi patahan terpanjang sepanjang sejarah. Bencana ini menyebabkan seluruh Planet Bumi bergetar dan memicu aktivitas gempa di berbagai wilayah, termasuk Alaska. Episentrumnya terletak antara Pulau Simeulue dan Sumatera. Gempa bumi tersebut merupakan gempa bumi terkuat di dunia yang pernah terjadi dalam satu generasi. Empat puluh lima menit kemudian gelombang tsunami melanda wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan hanya dalam waktu beberapa menit saja gelombang tersebut menyapu bersih daerah pesisir pantai Nanggroe Aceh Darussalam sepanjang 800 kilometer.

Sebagian besar wilayah yang terkena dampak bencana tersebut mengalami kerusakan berat yang sangat parah baik fisik, ekonomi dan sosial. Aspek sosial yaitu banyaknya orang-orang yang terkena dampak bencana kehilangan tempat tinggal hingga kehilangan sanak saudara dan juga hancurnya sektor-sektor sosial lainnya. Kerusakan infrastruktur umum, usaha-usaha swasta dan aset-aset produktif yang ada mengakibatkan kelumpuhan atas perekonomian di wilayah yang terkena bencana tersebut. Kondisi pemerintahan disaat itu pun tidak terkontrol karena adanya permasalahan antara pemerintah daerah Nanggroe Aceh Darussalam dan pemerintah pusat Indonesia yang masih belum tuntas dan ditambah lagi bencana yang sangat dasyat datang menerpa daerah ini, mengakibatkan pemerintah daerah menjadi korban sehingga pemerintahan disaat itu kalang kabut.

Penderitaan masyarakat Aceh dan Negara Indonesia saat itu mengakibatkan mendorong berbagai negara untuk memberi bantuan kemanusiaan dimana tercatat 44 negara yang terlibat secara langsung sejak masa darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Gempa yang diikuti dengan gelombang tsunami mahadahsyat ini telah meluluhlantakkan Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesia). Masyarakat internasional secara keseluruhan menyumbangkan lebih dari US\$14 miliar (2004) dalam bentuk bantuan kemanusiaan yang melibatkan banyak negara serta angkatan bersenjata dari seluruh penjuru dunia termasuk NGO (*Non-Government Organization*) baik organisasi massa, LSM, Lembaga Donor hingga Kelompok Mahasiswa. Salah satu negara yang paling pertama memiliki inisiatif untuk terlibat dalam memberikan bantuan di Aceh, Indonesia adalah Jepang.

Ketika gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam menjadi berita internasional, pemerintah Jepang menanggapi hal tersebut sebagai bencana yang sangat besar dan sadar akan kemampuan yang dimiliki untuk mengatasi kebutuhan kritis. Jepang memberikan bantuan luar negeri mulai dari pengiriman Tim Medis hingga bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Kehadiran Jepang baik melalui pemerintahan langsung maupun NGO dibawah koordinasi JICS (*Japan International Cooperation System*). Dari sejak terjadinya bencana tahun 2004 sampai berakhirnya bantuan pada tahun 2008, Jepang terus memberikan berbagai bentuk paket bantuan yang dirancang secara bertahap sesuai tahapannya. (BRR, 2015)

Dalam merespon kondisi ini maka pemerintah Indonesia pada saat itu membuat kebijakan yang sangat tepat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2005 yaitu membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias yang tugas utamanya adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur fisik, kehidupan masyarakat dan pemerintahan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. BRR NAD-Nias adalah suatu badan setingkat kementerian Negara atau lembaga yang dibentuk dengan tujuan mengelola dan bertanggung jawabkan transaksi keuangan yang bersumber baik dari dalam maupun luar negeri dan dana masyarakat untuk melakukan

rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca bencana alam gempa dan tsunami tahun 2004. Peran BRR sangat besar sebagai tulang punggung pelaksana rehab-rekon NAD Nias sebagai perwakilan dari pemerintah Indonesia.

Dengan demikian Jepang menjadi negara yang berperan paling aktif dalam proses membantu Indonesia menanggulangi bencana tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga dengan pengalaman serta teknologi yang dimilikinya membuat negara ini dapat beroperasi dalam penanganan bencana dan menyalurkan bantuan secara efektif serta bantuan Jepang kepada Indonesia dalam penanggulangan bencana di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti karena bantuan asing merupakan bantuan yang datang dari luar wilayah Indonesia yang wilayah terjadinya ada di Indonesia. Adanya pertarungan tentang kedaulatan dan kepentingan politik serta aspek bagaimana dan siapa yang akan mendistribusikan segala bentuk bantuan yang akan masuk ke dalam wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesia).

Bantuan Jepang kepada Indonesia dalam penanganan bencana gempa dan tsunami Nanggroe Aceh Darussalam ini meliputi finansial, teknis dan tenaga kemanusiaan yang semuanya adalah orang asing, terutama bantuan personal yang berasal dari pemerintah maupun non-pemerintah yang dapat mengimplikasikan bantuan penanganan bencana dengan pelembagaannya. Dibalik ramahnya bantuan kebencanaan yang diberikan, Jepang pun memiliki tujuan lain yaitu menggunakan politik diplomasi untuk menyebarkan pengaruh mereka mulai dari budaya, cara berfikir hingga barang-barang bantuan yang diproduksi dari Jepang kepada Indonesia. Dalam konteks ini maka menarik untuk mengkaji bagaimana Jepang menerapkan politik bantuan bencana dengan pelembagaan penanggulangan bencana hingga akhirnya dapat mempengaruhi dan memiliki power atas pemerintah Indonesia. Secara keseluruhan apa tujuan bantuan bencana Jepang dalam proses penanggulangan bencana di Aceh.

Maka dari itu penelitian dilapangan terkait dengan skripsi ini sangat diperlukan untuk membuktikan apakah Jepang memiliki motif dibalik bantuan penanganan bencana yang

diberikan. Hasil penelitian ini akan sangat berguna bagi Indonesia untuk mendisiplinkan dirinya dalam memperkuat konsep dan manajemen penanganan bencana dengan mengacu pada program dan mekanisme serta pengelolaan oleh pemerintah Jepang dalam penanganan bencana, khususnya bencana gempa dan tsunami Aceh yang lalu. Serta sebagai acuan untuk menyebarluaskan pengaruh Indonesia kepada negara lain dengan menggunakan diplomasi seperti yang dilakukan Jepang.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Jepang menerapkan politik bantuan bencana dalam upaya penanggulangan bencana di Aceh tahun 2004?

C. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu cara pandang atau persepsi tentang apa yang terjadi. Teori merupakan bentuk penjelasan paling umum yang memberitahu kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga bagi prediksi. Selain digunakan untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar bagi prediksi. Teori menggabungkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis saling berhubungan. Pada penyelesaian masalah yang ada pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep Diplomasi Bencana (*Disaster Diplomacy*) dan Manajemen Bencana (*Disaster Management*).

1. *Disaster Diplomacy*

Menurut Kelman dan Koukis diplomasi bencana alam atau *disaster diplomacy* adalah sebuah studi tentang bagaimana, mengapa dan apakah bencana alam dapat memberikan kontribusi terhadap perdamaian atau konflik dengan melakukan penelitian saat sebelum dan setelah bencana terjadi. Saat sebelum bencana alam terjadi, *disaster diplomacy* membahas tentang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Namun apabila bencana alam sudah terjadi, *disaster diplomacy* membahas tentang bagaimana konflik dan perdamaian dipengaruhi oleh bencana alam. Konsep dan pemahaman dari diplomasi

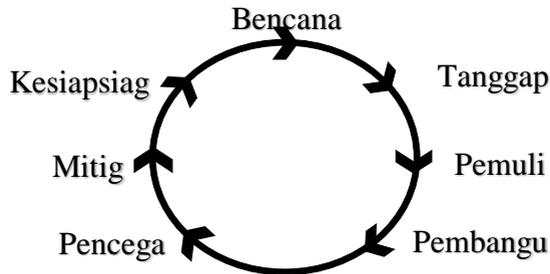
bencana ini dapat disinergikan dengan isu lokal dan nasional, sebagai bagian dari *soft diplomacy* yang menopang kerjasama dengan berbagai pihak dalam lingkup yang luas (Kelman, 2012). *Disaster diplomacy* juga membahas upaya-upaya yang dilakukan sebagai langkah kongkrit dalamantisipasi bencana alam yaitu dengan melakukan pencegahan dan rangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana (mitigasi). Serta langkah-langkah kongkrit yang dilakukan pasca bencana meliputi respon serta pemulihan, baik berkontribusi secara langsung atau pun tidak bagi kerjasama serta perdamaian (UN-ISDR Informs, 2007: 54). Diplomasi bencana dapat membuat serta mengembangkan kerjasama internasional. Bukan hanya itu, Diplomasi bencana adalah bentuk kerjasama yang efektif apabila mampu dijadikan sebagai salah satu wadah ataupun salah satu fokus dalam hubungan diplomatik (Herningtyas, 2014).

Sebagai negara yang telah berpengalaman diberbagai hal dalam bidang bencana alam atau kebencanaan, Jepang mempunyai banyak aspek yang ditawarkan dalam hal keilmuan dan keahlian hingga teknologi untuk melakukan penanganan penanggulangan bencana. Dengan begitu, Jepang mampu memberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi ke Aceh sebagai salah satu bentuk diplomasi bencana yang dilakukan oleh Jepang. Sehingga mampu meningkatkan hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia khususnya dalam aspek penanganan penanggulangan bencana dan lain-lain.

2. ***Disaster Management***

Konsep kedua yang dapat membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini yaitu konsep yang ditulis oleh Nurjanah dalam bukunya yang berjudul Manajemen Bencana. Manajemen Bencana atau *Disaster Management* merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen yang kita kenal seperti fungsi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* (Nurjanah, 2013). Cara bekerja Manajemen Bencana adalah melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada tiap siklus bidang kerja yaitu pertama pencegahan, yang kedua mitigasi dan kesiapsiagaan,

tanggap darurat dan pemulihan. Tujuan secara umum dari manajemen kebencanaan antara lain untuk melindungi nyawa masyarakat beserta aset-aset produktif hingga infrastruktur umum yang dimiliki wilayah tersebut supaya terhindar dari ancaman bencana. Berikut adalah format dasar manajemen bencana:



Gambar 1 Siklus Manajemen Bencana
Sumber: (Nurjanah, 2013)

Siklus ini menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan dari terjadinya bencana sampai menghindari dan meminimalisir dampak dari bencana itu sendiri. Pada prinsipnya penanggulangan bencana harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis seperti: cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan. Dalam Manajemen Kebencanaan juga memaparkan tentang manajemen tanggap darurat atau kedaruratan yang dijalankan, Manajemen ini mengatur hal-hal yang bersifat darurat pada saat terjadinya bencana. Kemudian manajemen personil atau relawan sebagai bentuk bantuan pertama cepat tanggap serta manajemen logistik dan peralatan untuk pemenuhan kebutuhan disaat situasi bencana.

Manajemen yang akan dibahas pertama yaitu manajemen kedaruratan. Manajemen kedaruratan adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanganan kedaruratan, pada saat menjelang, saat darurat

dan sesudah terjadi keadaan darurat. Posisi manajemen kedaruratan dalam manajemen bencana adalah dimulai sejak adanya tanda-tanda kemungkinan adanya terjadi bencana sampai dengan transisi dari kondisi darurat ke pemulihan. Manajemen darurat memiliki aspek-aspek sebagai berikut yaitu:

- a. Waktu yang sangat mendesak. Kondisi darurat hanya berlangsung singkat, oleh karena itu segala sesuatunya harus ditangani secara cepat dan tepat.
- b. Aspek kedua yaitu semua keputusan berisiko tinggi, dalam penanganan darurat diperlukan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat oleh penanggung jawab penanganan darurat pada kala itu. Penanggung jawab tersebut harus memiliki kompetensi, pengalaman, dan tanggung jawab yang besar serta keberanian bertindak dalam pengambilan keputusan secara cepat dan tepat supaya risiko yang ada dapat ditekan hingga sekecil mungkin.
- c. Aspek ketiga yaitu kebutuhan yang lebih besar dari sumber daya. Dengan dampak yang besar akibat bencana maka diperlukan nya sumber daya yang besar pula, sedangkan sumberdaya yang tersedia pada umumnya terbatas sehingga perlu dicarikan dukungan dari sumber lain dari luar daerah bencana.
- d. Aspek terakhir yaitu kewenangan koordinasi kabur, dalam situasi darurat semua pihak yang terlihat berada dalam kondisi panik. Dalam kondisi kemudian diperlukan kehadiran seorang *Incident Commander* atau bisa disebut dengan penanggung jawab yang mengendalikan situasi dan menkoordinasikan semua kepentingan serta pengerahan sumber daya atau bantuan darurat.

Manajemen kedaruratan memiliki karakteristik yang membebani sistem normal di mana kondisi pada saat itu harus ditangani secara sigap dan di luar cara-cara normal agar situasi atau kondisi dapat dikendalikan dengan cepat sehingga keputusan membawa konsekuensi langsung. Prinsip-prinsip di atas perlu menjadi pedoman dalam aksi

tanggap darurat pasca bencana dan perkembangannya yaitu situasi tanggap darurat selalu menetapkan prioritas untuk manajemen pengelolaan, dalam situasi darurat manajemen bencana meletakkan beberapa prioritas dalam hal distribusi baik melalui darat, laut hingga udara yang terkait dari upaya pihak luar daerah maupun negara yang ingin membantu untuk mempercepat proses tanggap darurat itu, ada dua hal dalam situasi bencana. Satu terkait manajemen mobilitas manusia tentang personil, *volunteer*, relawan kemanusiaan, kesehatan, lalu militer dan kedua tentang manajemen logistik dan peralatan. Kedua hal ini adalah yang paling *urgent* untuk dipersiapkan.

Manajemen personil atau relawan adalah salah satu unsur yang penting dalam menyalurkan bantuan kedaruratan cepat tanggap pasca bencana. Relawan penanggulangan bencana adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dalam upaya penanggulangan bencana. Sedangkan prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh relawan yaitu, cepat dan tepat, memiliki prioritas yaitu memberikan bala bantuan, dapat berkoordinasi dalam rangka penanggulangan bencana, berdaya guna dan berhasil guna, bersifat Transparansi dan Akuntabilitas, serta tidak memiliki sifat *Non-Diskriminatif* yaitu tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik dan *Non-Proselitisi* yang memiliki makna dilarang menyebarkan agama atau keyakinan.

Manajemen logistik dan peralatan atau bisa disebut *supplies* dan *transport* yang merupakan komponen yang sangat penting khususnya dalam operasi tanggap darurat untuk mendukung penyelenggaraan manajemen bencana. Logistik merupakan kegiatan penyaluran bahan pasokan, jumlah, kualitas, kondisi, keamanan, tempat, dan waktu yang tepat. Logistik merupakan komponen utama dalam operasi tanggap darurat, logistik ialah sesuatu yang berujud untuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan, kesehatan yang digunakan dalam penanggulangan bencana.

Konsep manajemen kebencanaan haruslah dapat diaplikasikan dalam penelitian ini sebagaimana gempa dan tsunami yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam yang membutuhkan manajemen atau koordinasi yang tepat untuk menanggulangi bencana. Dalam kaitan ini akan membuat kajian hubungan internasional menjadi sangat menarik, karena yang disebut orang dan barang dalam kasus ini tidak hanya berasal dari dalam negeri saja tetapi dari luar negeri juga, yang dalam situasi normal memiliki prosedur yang berbeda. Aktifitas manajemen bencana ini dimulai dari operasi tanggap darurat yang harus segera dilakukan oleh penanggung jawab yang berada disana, hingga penyaluran seluruh bentuk bantuan tahap pertama yang dikirimkan oleh Jepang dan diterima oleh penanggung jawab atau kelompok yang bertugas saat bencana terjadi di lokasi bencana. Aspek-aspek yang tertera dalam konsep ini nantinya akan dapat menjelaskan bagaimana Jepang dengan niat baik mereka untuk membantu Indonesia menyalurkan bantuan kebencanaan mulai dari tahapan awal atau tanggap darurat hingga tahapan akhir yaitu rekonstruksi.

D. Hipotesa

Jepang menerapkan politik bantuan bencana dalam upaya penanggulangan bencana di Aceh pada tahun 2004 dengan cara penekanan pada efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan dalam membuat sistem pengelolaan bantuan dan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan instruksi Jepang. Politik bantuan bencana dilakukan kepada negara Indonesia untuk mencapai beberapa tujuan tersendiri demi keuntungan Jepang.

E. Metode Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui diplomasi bantuan pemerintah Jepang dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca terkena musibah besar gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu dari sisi hubungan internasional.

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan gambaran yang nyata upaya yang dilakukan pemerintah Jepang dalam memberikan bantuan bencana lintas negara serta politik yang diterapkan di dalamnya. Cara kerja Jepang dapat dijadikan model bagi Indonesia dalam menjalin hubungan internasional melalui sistem bantuan bencana yang efektif, efisien dan bermanfaat langsung. Selain itu penelitian ini bertujuan menggali informasi keterlibatan unsur-unsur pemerintah dan masyarakat Jepang yang turut berpartisipasi dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat Aceh baik bantuan fisik maupun non-fisik selama rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dahulu.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menghasilkan informasi terkait dengan metode penelitian yang proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi tentang politik diplomasi bantuan pemerintah Jepang dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca musibah besar gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu dari sisi hubungan internasional. Hasil penelitian ini akan mendeskripsikan, menjelaskan dan memvalidasi seluruh informasi terkait dengan politik bantuan Jepang di Aceh selama masa tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami tahun 2004 di Aceh.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode deduktif yang didasarkan pada kerangka teori untuk menghasilkan hipotesa yang selanjutnya akan diuji melalui data empiris. Tujuannya adalah guna menelaah suatu prinsip-prinsip umum untuk menguji peristiwa-peristiwa khusus.

Pengumpulan data atau informasi dilakukan dengan menggali data primer melalui angket dan wawancara. Untuk melengkapi data primer, dilakukan pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka serta referensi berbagai media cetak seperti buku, makalah, surat kabar, dan juga

media elektronik internet serta dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan.

F. Jangkauan Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus dan jelas sehingga sesuai dengan tujuan penelitian maka ditentukan jangkauan penelitian. Dalam penelitian ini, maka jangkauan penelitian dibatasi pada waktu ditentukan dari tahun 2004 sejak terjadinya bencana gempa dan tsunami hingga sampai berakhirnya bantuan yang diberikan oleh Jepang pada tahun 2009. Periode ini dikenal dengan masa tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias yaitu tahun 2004-2009. Penelitian ini terfokus pada politik diplomasi dan jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah Jepang dan komponen masyarakat Jepang kepada pemerintah dan masyarakat Aceh yang ditinjau dari sisi hubungan internasional.

G. Sistematika Penulisan

BAB I *Pendahuluan.* Bab ini akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, dan metode penelitian serta teknik pengumpulan data.

BAB II *Posisi Jepang Sebagai Pemberi Bantuan Asing dan Bencana Alam.* Dalam bab ini dibahas lebih dalam tentang situasi Negara Jepang pasca perang Dunia ke-II sebagai penerima bantuan asing (*recipient*) hingga menjadi pemberi bantuan asing (*donor*), serta bencana-bencana yang telah dilalui Negara ini. Seluruh pengalaman yang dimiliki Jepang membuat Negara ini berpengalaman dalam isu bencana alam yang terjadi, baik melalui upaya internal maupun eksternal.

BAB III *Bencana Gempa dan Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam 2004 dan Bantuan Penanggulangan Bencana Internasional.* Bab ini membahas tentang gempa dan tsunami yang melululantahkan Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2004 serta peran upaya

pemerintah Indonesia dan masyarakat internasional dalam memberikan bantuan penanganan penanggulangan bencana di Aceh, Indonesia.

BAB IV *Upaya Bantuan Penanggulangan Bencana Jepang di Aceh.* Bab ini membahas bagaimana keterlibatan pihak Jepang dalam **penanggulangan** bencana di Aceh dari tahap bantuan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Serta menjelaskan bagaimana politik bantuan dilaksanakan oleh Jepang.

BAB V *Kesimpulan.* Merupakan penutup dari **keseluruhan** bab dan berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.